



Digitalisasi Pelayanan Publik Kesehatan: Strategi Penanggulangan Penyakit Tropis Secara Efektif

Disusun Oleh: Fikri Wahiddinsyah

Summary

Penyakit tropis seperti dengue, malaria, dan tuberkulosis masih menjadi tantangan utama dalam sistem kesehatan di Indonesia. Akar permasalahan meliputi keterbatasan akses layanan kesehatan, distribusi tenaga medis yang tidak merata, serta lemahnya sistem informasi kesehatan. Data WHO (2023) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan beban dengue tertinggi di Asia Tenggara, dengan lebih dari 143.000 kasus dilaporkan pada 2022. Permasalahan ini menjadi strategis karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan beban pembiayaan kesehatan nasional. Digitalisasi pelayanan kesehatan menawarkan solusi melalui pemanfaatan telemedicine, sistem informasi kesehatan terintegrasi, dan pemantauan berbasis data real-time. Strategi ini memungkinkan peningkatan efisiensi layanan, deteksi dini penyakit, serta pengambilan kebijakan berbasis data. Implementasi kebijakan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, institusi kesehatan, serta sektor swasta teknologi. Dengan pendekatan kolaboratif, digitalisasi berpotensi meningkatkan efektivitas penanggulangan penyakit tropis secara signifikan.

Pendahuluan

Penyakit tropis masih menjadi isu kesehatan publik yang signifikan di Indonesia, terutama di wilayah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang rentan. Penyakit seperti dengue, malaria, dan tuberkulosis tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2023), angka insiden dengue di Indonesia mencapai 52 per 100.000 penduduk, dengan tingkat kematian yang masih menjadi perhatian serius di beberapa provinsi.

Di sisi lain, pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta lemahnya integrasi data kesehatan. Hal ini diperkuat oleh laporan World Bank (2020) yang menyatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia masih menghadapi fragmentasi data dan rendahnya interoperabilitas antar fasilitas layanan kesehatan. Kondisi ini menghambat deteksi dini dan respons cepat terhadap penyebaran penyakit tropis.

Digitalisasi pelayanan kesehatan menjadi salah satu strategi yang didorong dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Implementasi sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, dan layanan telemedicine telah mulai dikembangkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Studi oleh Kruse et al. (2018) menunjukkan bahwa telemedicine dapat meningkatkan akses layanan kesehatan hingga 30% di daerah terpencil. Namun, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi kesehatan, terutama di wilayah dengan beban penyakit tropis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk memastikan bahwa digitalisasi pelayanan kesehatan dapat menjadi solusi efektif dalam penanggulangan penyakit tropis.

Dengan demikian, policy brief ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan digitalisasi pelayanan kesehatan dalam konteks penyakit tropis serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan implementatif.



Permasalahan

Permasalahan utama dalam penanggulangan penyakit tropis di Indonesia berkaitan dengan keterbatasan sistem pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya yaitu:

➤ Fragmentasi Sistem Informasi Kesehatan

Salah satu permasalahan utama dalam digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia adalah belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan antar fasilitas layanan. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik masih menggunakan sistem yang berbeda sehingga data pasien dan laporan penyakit tropis tidak dapat terhubung secara real-time. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan kasus dan menghambat deteksi dini terhadap potensi wabah. Padahal, dalam konteks penyakit tropis seperti dengue dan malaria, kecepatan informasi sangat menentukan efektivitas respons kebijakan. Meskipun pemerintah telah mengembangkan platform nasional seperti SATUSEHAT, implementasinya belum merata dan masih menghadapi kendala interoperabilitas sistem. Akibatnya, pengambilan keputusan seringkali tidak berbasis data yang komprehensif dan aktual. Menurut WHO (2023), sistem surveilans yang tidak terintegrasi dapat menghambat deteksi dini wabah penyakit hingga 40%.

➤ Ketimpangan Infrastruktur Digital di Daerah Terpencil

Permasalahan berikutnya adalah ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak fasilitas kesehatan di daerah terpencil belum memiliki akses internet yang stabil maupun perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung layanan kesehatan digital. Hal ini menyebabkan program digitalisasi tidak dapat berjalan optimal di wilayah yang justru memiliki beban penyakit tropis yang tinggi. Ketimpangan ini memperparah disparitas pelayanan publik, di mana masyarakat di daerah urban dapat menikmati layanan kesehatan berbasis teknologi, sementara masyarakat di daerah rural masih bergantung pada layanan konvensional yang terbatas. Akibatnya, terjadi keterlambatan diagnosis dan penanganan penyakit yang berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian.

➤ Keterbatasan Kapasitas SDM Kesehatan dalam Pemanfaatan Teknologi

Selain faktor infrastruktur, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga menjadi hambatan signifikan.

Banyak tenaga kesehatan belum memiliki kompetensi yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital, seperti rekam medis elektronik dan layanan telemedicine. Minimnya pelatihan serta tingginya beban kerja membuat adaptasi terhadap teknologi menjadi lambat. Dalam beberapa kasus, teknologi yang telah tersedia justru tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pemahaman dan keterampilan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya membutuhkan investasi teknologi, tetapi juga penguatan kapasitas SDM sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan.

➤ Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan layanan kesehatan digital. Sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kelompok usia lanjut, masih belum familiar dengan penggunaan aplikasi kesehatan atau layanan telemedicine. Selain itu, terdapat faktor sosial dan budaya yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap layanan digital. Banyak masyarakat yang masih lebih percaya pada layanan tatap muka dibandingkan layanan berbasis teknologi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat adopsi layanan kesehatan digital, sehingga potensi digitalisasi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

➤ Kesenjangan Implementasi Kebijakan (Implementation Gap)

Meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan digitalisasi kesehatan, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya (implementation gap). Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif juga menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Akibatnya, digitalisasi pelayanan kesehatan belum mampu memberikan dampak signifikan dalam penanggulangan penyakit tropis secara nasional.



Rekomendasi Kebijakan

► Penguatan Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional

Pemerintah perlu mempercepat integrasi sistem informasi kesehatan melalui penguatan platform nasional seperti SATUSEHAT. Integrasi ini harus mencakup seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, dengan standar interoperabilitas yang jelas. Dengan sistem yang terintegrasi, data penyakit tropis dapat dipantau secara real-time sehingga memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi wabah. Selain itu, integrasi data juga akan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih akurat dan efektif.

► Penguatan Kapasitas SDM Kesehatan

Pengembangan kapasitas SDM kesehatan merupakan kunci keberhasilan implementasi digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan terkait penggunaan teknologi digital, termasuk telemedicine dan sistem informasi kesehatan. Selain itu, kompetensi digital juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan. Dengan SDM yang kompeten, pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara optimal sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

► Pemerataan Infrastruktur Digital Kesehatan

Upaya digitalisasi tidak akan berhasil tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil, khususnya wilayah dengan tingkat endemisitas penyakit tropis yang tinggi. Investasi dalam jaringan internet, perangkat teknologi, serta fasilitas pendukung lainnya harus menjadi bagian dari kebijakan nasional. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi strategi untuk mempercepat pemerataan akses teknologi kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

► Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan digital, diperlukan upaya peningkatan literasi digital masyarakat. Pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi melalui berbagai media serta melibatkan kader kesehatan dan organisasi masyarakat dalam sosialisasi. Selain itu, pengembangan aplikasi kesehatan yang sederhana dan mudah digunakan juga penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan layanan kesehatan berbasis teknologi secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing public policy: Governance in theory and practice. Sage Publications. ISBN: 978-0761970334
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2023. <https://www.kemkes.go.id>
- Kruse, C. S., Krowski, N., Rodriguez, B., Tran, L., Vela, J., & Brooks, M. (2018). Telehealth and patient satisfaction: A systematic review. *BMJ Open*, 7(8), e016242. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016242>
- World Bank. (2020). Improving Indonesia's health system performance. <https://www.worldbank.org>
- World Health Organization. (2019). Digital health systems in Estonia. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2023). Dengue and severe dengue. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>

